

## CERTIFICATE OF ORIGINALITY

To Whom It May Concern:

This is to certify that the following document has been checked for originality with premium plagiarism checker. The result is as follows:

<b>Originality Report</b>	
Document Title	Model Ipo-Approach Dalam Evaluasi Kebijakan Publik
Author(s)	Yulianto Kadji
Similarity Found	11%
Statistics	205 words Plagiarized / 1934 Total words
Remark(s)	Low Plagiarism Detected
<b>Internet Sources</b>	
<p>&lt;1% - rizkie-library.blogspot.com/2015            1% - rizkie-library.blogspot.com/2015/12/konsep-evaluasi...            &lt;1% - makalah-kebijakan.blogspot.com/2012/04/makalah.html            1% - media-ilman.blogspot.com/.../konsep-evaluasi-kebijakan.html            &lt;1% - download.portalgaruda.org/article.php?article=258345&amp;val...            2% - xpresipena.blogspot.com/2011/11/evaluasi-kebijakan...            1% - indikator pokok adalah standar yang mengarah ke yang baik dan peningkatan kesadaran.            2% - digilib.unila.ac.id/2146/12/BAB II.pdf            &lt;1% - par-excelence.blogspot.com/2008/05/skripsi.html            1% - dan kabupaten/kota terdiri dari dari daerah dan dan yang yang oleh oleh daerah daerah</p>	

### TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



Date: Friday, October 05, 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Novriyanto Napu", is written over a light blue rectangular background.



**Novriyanto Napu, M.AppLing., Ph.D.**  
Director

**TRANSBAHASA**

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. [transbahasa.go@gmail.com](mailto:transbahasa.go@gmail.com) / Phone. +62 853 9862 5876

[www.transbahasa.co.id](http://www.transbahasa.co.id)



merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan publik dalam aktivitasnya paling tidak ada tiga dimensi utama kebijakan publik, yaitu 1) Formulasi Kebijakan (Policy of formulation), 2) Implementasi Kebijakan (Policy of implementation), dan 3) Evaluasi Kebijakan (Policy of implementation). Dan dalam kajian ini difokuskan pada satu dimensi, yakni : Evaluasi Kebijakan (Policy of Evaluation), yang lebih khusus membahas tentang : "Model IPO-Approach dalam Evaluasi Kebijakan Publik".

Model IPO-Approach dalam Evaluasi Kebijakan Publik Tinjauan atas beberapa pendapat tentang Evaluasi Kebijakan Publik Sebuah kebijakan publik tidak bisa dibiarkan **begitu saja, tanpa melakukan sebuah pengujian atau evaluasi.** Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai dan mengetahui keefektifan dari kebijakan publik tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publiknya demi pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk melihat mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Sofyan Efendi menegaskan bahwa : "Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga makna; i) evaluasi perumusan kebijakan, ii) evaluasi implementasi kebijakan, dan iii) evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil-guna atau tidak. Sementara William Dunn (1999) mengemukakan bahwa sebutan evaluasi bisa diartikan **dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).**

Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau kegunaan hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang otentik dan terpercaya tentang kinerja kebijakan, yaitu tentang progress pencapaian dari kesempatan, kebutuhannya, dan nilai melalui tindakan publik; evaluasi memberikan sumbangan pada penjelasan dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar memilih tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada penggunaan metode-metode penafsiran kebijakan lainnya, baik itu masalah maupun rekomendasi.

Jadi, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan kinerja kebijakan, khususnya melihat sejauhmana proses implementasi kebijakan publik. Evaluasi terhadap perumusan dilaksanakan pada sisi post-tindakan, yakni lebih kepada proses perumusan dibandingkan dengan muatan kebijakan yang pada umumnya hanya menilai prosesnya

#### **TRANSBAHASA**

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

apakah sudah berdasarkan dengan prosedur yang telah ditentukan. Menurut Samodra Wibawa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi: Eksplanasi.

Melalui evaluasi dapat digambarkan kenyataan dalam melaksanakan program dan juga dapat dibuat suatu generalisasi mengenai pola-pola hubungan antar beragam dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi atau pengujian ini evaluator ataupun penguji dapat melakukan identifikasi masalah, kondisi, dan pelaku yang menjadi pendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Kepatuhan.

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Audit. Evaluasi dapat membantu untuk mengetahui output telah benar-benar sampai ke tangan kelompok yang menjadi kebijakan, atau terdapat kebocoran atau penyimpangan, dan Accounting. Aktivitas accounting dimaksudkan agar dengan evaluasi adanya tersebut akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut dapat diketahui.

Berkenaan dengan evaluasi formulasi kebijakan, perlu diketahui beberapa persyaratan untuk dilaksanakan dalam rangka evaluasi kebijakan, yaitu: Menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, karena setiap permasalahan publik membutuhkan acuan formulasi kebijakan publik yang berlainan, Berorientasi pada permasalahan inti, karena setiap pemecahan permasalahan harus benar-benar terarah kepada pusat permasalahannya, Mengikuti prosedur dan/atau tata cara yang diterima secara bersama, baik itu mengenai keabsahan atau juga dalam rangka persamann dan keterpaduan langkah perumusan, dan Mengotimalkan sumber daya yang ada, baik itu waktu, manusia, dana, dan kondisi lingkungan yang strategis.

Kembali Sofyan Effendi menegaskan bahwa tujuan dari evaluasi penerapan kebijakan publik ialah untuk mengetahui apa variasi dalam parameter kinerja yang digunakan dalam menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: 1) bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berhubungan dengan kinerja penerapan publik (variasi dari outcome) pada variabel independent tertentu, 2) faktor-faktor yang menjadi penyebab variasi itu? Jawabnya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi penerapan kebijakan, dan lingkungan penerapan kebijakan yang berdampak pada variasi hasil (outcome) dari penerapan kebijakan.

Dalam hal melakukan evaluasi kebijakan, Tangkilisan (2003:1-2) mengemukakan lima unsur pokok evaluasi kebijakan, yaitu: Tujuan (goals), termasuk kendala normative dan

**TRANSBAHASA**

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan, Kebijakan, program, proyek, keputusan, pilihan, sarana, atau referensi lain yang tersedia dalam pencapaian tujuan, Hubungan antara kebijakan dan tujuan, dan juga hubungan yang dibentuk oleh intuisi, statistik, pengamatan, deduksi, kewenangan, perkiraan, atau sarana lain, Perumusan kesimpulan yang kondisional merupakan kebijakan atau gabungan kebijakan paling baik untuk dianut mengenai tujuan, kebijakan, dan hubungan dan Menetapkan apa yang akan dilakukan dalam pemetaan referensi kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik dibagi tiga tahapan kegiatan, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan sesudah dilaksanakan kebijakan itu. Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut Willian Dunn (1999) adalah evaluasi summatif. Evaluasi yang dalam waktu pelaksanaan umumnya disebut evaluasi proses. Evaluasi yang dilakukan **setelah kebijakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output)** ataupun kebijakan dan/atau evaluasi impact/pengaruh/dampak (outcome) kebijakan.

Secara spesifik, Dunn menguraikan tiga pendekatan evaluasi penerapan kebijakan, yaitu: 1) evaluasi semu, 2) evaluasi formal, dan 3) evaluasi keputusan teoritis. Sebagai bahan perbandingan, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000) mengkategorikan evaluasi implementasi/penerapan kebijakan menjadi evaluasi proses, yakni evaluasi yang berhubungan dengan proses penerapan; evaluasi impact, yakni evaluasi berhubungan dengan hasil (output) dan/atau dampak dari penerapan kebijakan; evaluasi kebijakan, ialah untuk mengetahui hasil yang dicapai sebagai cerminan dari tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi metaevaluasi yang berhubungan dengan evaluasi dari bermacam penerapan kebijakan-kebijakan yang ada untuk proses penemuan persamaan-persamaan tertentu. Sementara Ernest R.

House membuat dan menguraikan taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang mengelompokkan model evaluasi menjadi: Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi, Model perilaku, dengan indikator utama produktivitas dan akuntabilitas, Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas, Model tujuan-bebas (goal free), dengan indikator pokok ialah alternatif dari penggunaan dan manfaat sosial, Model kekritisan seni atau ulasan (art criticism), dengan **indikator pokok adalah standar yang mengarah ke yang baik dan peningkatan kesadaran.**

Model review professional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional, Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator pokok yaitu **resolusi, dan Model studi kasus, dengan indikator** pokok yaitu penafsiran atas keberagaman. Edward A.Sushman

**TRANSBAHASA**

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

mengemukakan enam langkah praktis dalam evaluasi kebijakan, yaitu: 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, 2) analisis terhadap masalah, 3) deskripsi dan standardisasi kegiatan, 4) pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, 5) menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain, dan 6) beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berkenaan dengan evaluasi kebijakan, Kadji (2008:30-31) menegaskan bahwa terdapat empat aktivitas Evaluasi Kebijakan (Policy of Evaluation), yakni: Evaluasi Kompatibilitas (kesesuaian atau kecocokan), yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang ditetapkan tersebut memang tepat, sesuai atau cocok untuk dipertahankan, perlukah diganti dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini tepat, sesuai atau cocok dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pihak Swasta atau oleh Sivil Society (Perguruan Tinggi, Pers dan Komunitas masyarakat lainnya); Evaluasi Efektivitas, yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang dilaksanakan telah menghasilkan output dan dampak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut; juga akan melihat apakah program kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; Evaluasi Efisiensi, yaitu melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan pada saat kebijakan itu diimplementasikan. Atau dengan kata lain apakah input yang digunakan sebanding dengan output yang diharapkan.

Dan apakah cukup efisien penggunaan keuangan publik dan sumber daya dalam mencapai dampak kebijakan; dan juga akan melihat apakah program kebijakan yang dilaksanakan telah memberi dampak dan manfaat bagi sasaran kebijakan tersebut; Evaluasi Meta, yaitu melakukan penilaian terhadap proses evaluasi itu sendiri atau sifatnya otokritik terhadap teknik evaluasi yang dilakukan.

Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang dan profesional? Apakah evaluasi yang dilakukan tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, kultural, dan lingkungan? Apakah evaluasi tersebut menghasilkan produk riset yang dapat mempengaruhi kebijakan publik selanjutnya?. Deskripsi Model IPO-Approach dalam Evaluasi Kebijakan Publik PS pengembangan Model Evaluasi/pngujian Kebijakan Publik yang disebut dengan Model IPO-Approach dalam **Evaluasi Kebijakan Publik dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini: Gambar 1.**

Model IPO-Approach Dalam Evaluasi Kebijakan Publik Model IPO-Approach memiliki

**TRANSBAHASA**

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

formula sebagai berikut: Model IPO-Approach ini sebagai model pendekatan dalam perspektif lokal ke-Indonesia-an, setelah mengkaji berbagai model Evaluasi Kebijakan Publik, maka penulis menggagas mengembangkan model yang disebut dengan Model IPO-Approach. Untuk menghasilkan Kinerja kebijakan publik benar-benar untuk : Kepentingan Publik, maka dibutuhkan suatu rangkaian Evaluasi Kebijakan Publik dengan Model IPO IPO-Approach (INPUTS-Approach, PROCESS-Approach, dan OUTPUTS - Approach,) yang dapat dijelaskan berikut ini: Dimensi INPUTS-Approach Dalam dimensi ini eksistensi Government (penyelenggara pemerintahan daerah) yaitu: Eksekutif dan Legislatif, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 57 bahwa : "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang didukung oleh Perangkat Daerah".

Tegastlah, bahwa pemerintah dimaksud disini adalah Kepala Daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif). Dalam perspektif ini, maka yang menjadi Evaluator Kebijakan Publik Leading Sectornya ada di Legislatif, walaupun demikian pihak Eksekutif juga bisa sebagai Evaluator Kebijakan Publik secara internal. Dalam perspektif akademik, maka Periset atau peneliti dapat juga bertindak sebagai Evaluator Kebijakan Publik.

Dalam dimensi INPUTS-Approach yang menjadi indikator perhatian adalah : (i) Evaluator kebijakan, (ii) Produk kebijakan publik yang mendasari pelaksanaan program yang akan dievaluasi, dan (iii) Standard Operating Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan evaluasi kebijakan publik. Dimensi PROCESS-Approach Dimensi ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan evaluasi kebijakan publik, yang paling tidak meliputi : (i) Evaluasi Pada Proses Implementasi Kebijakan dengan menggunakan Metode Deskriptif, dan indikator yang dilihat antara lain adalah: a) Pelaksana evaluasi, b) Swot Analysis, b) Tujuan Evaluasi, dan (ii) Evaluasi Dampak dengan menggunakan Metode Kausal, dan indikator yang dilihat antara lain adalah : a) Pelaksana evaluasi, b) Tujuan Evaluasi, c) Hasil dan dampak kebijakan program.

Dalam proses evaluasi dapat juga dilakukan dengan pendekatan : (1) Evaluasi Kompatibilitas (Kesesuaian atau kecocokan), (ii) Evaluasi Efektivitas (Sesuai dengan peraturan), (iii) Evaluasi Efisiensi (Sesuai sasaran dan tujuan program), dan (iv) Evaluasi Meta (Otokritik terhadap teknik evaluasi) Dimensi OUTPUTS -Approach Dimensi ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan publik melahirkan rekomendasi kebijakan, dengan indikatornya : a) Kebijakan program dihentikan, b) program diteruskan dengan beberapa saran perbaikan, dan c) kebijakan program dilanjutkan tanpa perbaikan.

#### **TRANSBAHASA**

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



Apapun indikator yang direkomendasikan, maka harus dapat diukur standard keberhasilan kebijakan bahwa setiap kebijakan itu berpihak kepada kepentingan publik. Dalam rangkaian proses dan tahapan Model IPI-Approach semestinya juga memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yakni apa yang disebut dengan : (i) Lingkungan Mikro dan (ii) Lingkungan Global, sehingga secara utuh dapat dilihat sejauhmana efektif tidaknya sebuah kebijakan program yang diimplementasikan, yang bermuara pada pencapaian kinerja kebijakan publik yang ideal sesuai tujuan dan sasaran yang dirumuskan bersama.

Penutup E valuasi kebijakan, menempatkan sebuah produk kebijakan pada saat proses dan endingnya implementasi perlu di evaluasi untuk memperoleh umpan balik, apakah produk kebijakan itu perlu diteruskan dengan perbaikan atau tanpa perbaikan, atau bahkan kebijakan itu perlu ditinjau kembali dan tidak dilanjutkan dimasa-masa mendatang. Untuk maksud tersebut maka penulis mengembangkan Model Evaluasi Kebijakan Publik yang disebut dengan Model IPO-Approach Dalam Evaluasi Kebijakan Publik.

#### INTERNET SOURCES:

---

- <1% - rizkie-library.blogspot.com/2015
- 1% - rizkie-library.blogspot.com/2015/12/konsep-evaluasi...
- <1% - makalah-kebijakan.blogspot.com/2012/04/makalah.html
- 1% - media-ilman.blogspot.com/.../konsep-evaluasi-kebijakan.html
- <1% - download.portalgaruda.org/article.php?article=258345&val...
- 2% - xpresipena.blogspot.com/2011/11/evaluasi-kebijakan...
- 1% - indikator pokok adalah standar yang mengarah ke yang baik dan peningkatan kesadaran.
- 2% - digilib.unila.ac.id/2146/12/BAB II.pdf
- <1% - par-excelence.blogspot.com/2008/05/skripsi.html
- 1% - dan kabupaten/kota terdiri dari dari daerah dan dan yang yang oleh oleh daerah daerah

#### **TRANSBAHASA**

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id